

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Risiko Bencana (Studi Bendung Cihamerang di Kabupaten Sumedang)

Selvina Intan Budiman¹, Ningrum Fauziah Yusuf²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: selvinaintanwork@gmail.com, ningrumfzhy@uinsgd.ac.id

Keywords:
*Policy
 Implementation,
 Disaster Risk
 Mitigation,
 Cihamerang Dam*

Abstract: *This study aims to determine the implementation of government policies in disaster risk mitigation at the Cihamerang Dam in Sumedang Regency and identify the factors that influence it. The method used is a qualitative approach with descriptive methods through observation, interviews, and documentation techniques. The results of the study indicate that policy implementation has not been running optimally, characterized by unclear standards and policy targets, limited resources, especially financial, and ineffective coordination and communication between agencies. In addition, the declining socio-economic conditions of the affected community also affect the effectiveness of policy implementation. In conclusion, the implementation of disaster risk mitigation policies at the Cihamerang Dam still requires improvement, particularly in terms of clarity of policy direction, strengthening resources, and improving coordination and communication between stakeholders to be more effective and responsive.*

Kata Kunci:
*Implementasi
 Kebijakan,
 Mitigasi Risiko
 Bencana,
 Bendung
 Cihamerang*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam mitigasi risiko bencana di Bendung Cihamerang Kabupaten Sumedang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal, ditandai dengan belum jelasnya standar dan sasaran kebijakan, keterbatasan sumber daya terutama finansial, serta koordinasi dan komunikasi antar instansi yang belum efektif. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak yang menurun turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana di Bendung Cihamerang masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam kejelasan arah kebijakan, penguatan sumber daya, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan agar lebih efektif dan responsif.*

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

Namun, dalam implementasinya, pembangunan sering kali menimbulkan dampak lingkungan dan sosial apabila tidak diiringi dengan perencanaan mitigasi risiko yang memadai. Salah satu fenomena yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Bendung Cihamerang di Kabupaten Sumedang yang muncul sebagai dampak dari pembangunan proyek Tol Cisumdawu.

Bendung ini terbentuk akibat aktivitas pembuangan material tanah (disposal) proyek yang menutup aliran sungai di kawasan Desa Sukasirnarasa, Kecamatan Rancakalong, sehingga menyebabkan genangan air yang luas menyerupai bendungan (Wijaya, 2025). Genangan tersebut berdampak langsung pada lahan pertanian warga, di mana sekitar 8 hektare sawah tidak lagi dapat digarap sehingga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat (Wijaya, 2025). Bahkan, kondisi ini telah berlangsung cukup lama, dengan sebagian lahan tidak dapat digunakan selama hampir lima tahun, sehingga memperparah kerugian ekonomi warga (Arryan, 2026). Selain itu, keberadaan bendung ini juga menimbulkan risiko bencana lanjutan seperti potensi banjir, longsor, serta ancaman terhadap permukiman dan infrastruktur di sekitarnya (Wijaya, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan mitigasi bencana tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan pemerintah di tingkat lokal. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn dalam Agustino, (2020), yang mencakup enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Sebagai pembanding, penelitian terdahulu oleh Nugraha et al., (2020) mengenai implementasi kebijakan mitigasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya di lapangan, baik dari segi sumber daya, koordinasi, maupun kondisi lingkungan sosial masyarakat.

Temuan tersebut memperkuat pentingnya analisis implementasi kebijakan dalam konteks mitigasi bencana, khususnya pada kasus Bendung Cihamerang yang memiliki karakteristik permasalahan yang lebih spesifik dan kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah dalam mitigasi risiko bencana Bendung Cihamerang, yang ditandai dengan masih berlangsungnya dampak lingkungan, ketidakpastian penanganan bagi masyarakat, serta potensi risiko bencana lanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam mitigasi risiko bencana di Bendung Cihamerang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitar.

Penelitian ini penting baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan dan mitigasi bencana berbasis studi kasus empiris. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan mitigasi risiko bencana yang lebih efektif, responsif, dan tepat sasaran, serta mendukung pengelolaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan Literatur

Tinjauan Teoritis

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno, (2012) menyatakan bahwa "implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible*)”.

Selanjutnya, menurut Grindle dalam Winarno, (2012) mengemukakan bahwa "implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”.

Selanjutnya Van Meter & Van Horn dalam Subianto, (2020) implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Mitigasi Risiko Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Untuk mengurangi dampak resiko kejadian bencana maka perlu adanya tindakan mitigasi bencana. (Nugraha et al., 2020)

Dalam PP No. 21 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat 6 disebutkan Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun tujuan mitigasi bencana yaitu meminimalisir risiko bencana, sebagai pedoman pemerintah dalam pembangunan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana (Fadhilah & Yuliani, 2024).

Infrastruktur dan Risiko Lingkungan

Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari *publik capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam hal ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003).

Risiko lingkungan disebabkan oleh lingkungan eksternal yang mempengaruhi tingkat operasional sebuah rantai pasokan. Berbagai faktor lingkungan eksternal dapat memengaruhi entitas atau seluruh rantai pasokan. Beberapa contoh risiko lingkungan disebabkan oleh bencana alam, serangan teroris, penurunan ekonomi, ketidakstabilan politik, relokasi pabrik maupun faktor lingkungan lainnya (Prakash et al., 2017).

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun secara normatif kebijakan telah dirumuskan dengan cukup baik. Penelitian oleh Nugraha et al., (2020) yang mengkaji implementasi kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Sumedang menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya serta belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kesiapan aktor pelaksana dan dukungan sumber daya yang memadai.

Sejalan dengan itu, penelitian Sakti et al., (2020) mengenai program mitigasi berbasis masyarakat melalui Desa Tangguh Bencana menunjukkan bahwa upaya mitigasi telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat, namun efektivitasnya masih bergantung pada tingkat kapasitas dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mitigasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung.

Selanjutnya, penelitian Baihaqi & Kurniadi, (2023) terkait implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa kebijakan yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan sosialisasi mampu meningkatkan ketahanan wilayah. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, penelitian Haeril et al., (2021) di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa implementasi mitigasi bencana masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara sistematis, sehingga kurang efektif dalam mengurangi risiko bencana.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana terletak pada aspek sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada jenis bencana tertentu seperti banjir atau pada program mitigasi secara umum, dan belum banyak yang mengkaji secara spesifik dampak pembangunan infrastruktur terhadap munculnya risiko bencana baru.

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung lebih menitikberatkan pada perspektif pemerintah atau lembaga pelaksana kebijakan, sementara analisis terhadap dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat terdampak masih terbatas. Padahal, dalam konteks mitigasi bencana, masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan konsekuensi dari keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan bahwa kajian mengenai implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, khususnya pada kasus bendung atau genangan seperti Bendung Cihamerang, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana pada kasus spesifik Bendung Cihamerang di Kabupaten Sumedang, menggunakan pendekatan model Van Meter & Van Horn, serta mengintegrasikan analisis dari sisi pemerintah dan masyarakat terdampak secara lebih komprehensif. Penelitian ini juga menjadi yang pertama secara spesifik meneliti Bendung Cihamerang dalam perspektif administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, atau berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa, kepala dusun,

dan masyarakat terdampak, juga melalui observasi di Kawasan Bendung Cihamerang Kabupaten Sumedang. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dari website resmi kabupaten sumedang dan Dinas PUPR Kabupaten Sumedang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2022). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data menurut (Miles et al., 2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sementara itu untuk menguji keabsahan data, yang didapat di lapangan dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dengan melakukan langkah-langkah seperti reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan dari Van Meter & Van Horn dalam Agustino, (2020), yang mencakup enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik para agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Model ini digunakan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan mitigasi risiko bencana di Bendung Cihamerang diimplementasikan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Data Dampak Bendung Cihamerang

No.	Kategori Dampak	Jumlah / Luas	Keterangan
1	Luas lahan	8,7725 Hektare	Lahan pertanian tergenang
2	Jumlah petani	63 Pemilik/penggarap	Kehilangan mata pencaharian
3	Jenis lahan	Sawah	Tidak dapat ditanami
4	Dampak utama	Genangan air	Bersifat permanen/ semi permanen
5	Potensi risiko	Banjir & longsor	Saat musim hujan
6	Kondisi ekonomi	Menurun	Pendapatan berkurang

Sumber: Data Terdampak Sesuai SPPT

Diskusi

Standar Dan Sasaran Kebijakan

Dalam proses pencapaian tujuan dari suatu organisasi tentu dibutuhkan kebijakan yang mengatur proses pencapaian tujuan dari organisasi tersebut (Aulia et al., 2024). Dalam kasus mitigasi bencana Bendung Cihamerang, pemerintah telah menetapkan langkah-langkah teknis seperti pengeringan bendungan dan penyedotan air sebagai upaya pengurangan risiko. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar formal dan pemahaman masyarakat.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami kebingungan terkait arah kebijakan. Masyarakat A mengungkapkan: "Kami masih khawatir kalau sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, karena belum tahu pasti sejauh mana kondisi bendungan ini aman." (Wawancara, 25 April 2026), selain itu masyarakat B juga menyatakan: "Arahan pemerintah itu ada, tapi belum semuanya jelas. Kadang kami masih bingung harus bagaimana kalau terjadi keadaan darurat." (Wawancara, 30 Mei 2026),

Temuan ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam penerjemahan standar kebijakan ke tingkat masyarakat (*goal ambiguity*). Secara teoritis, model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn dalam Agustino, (2020) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan standar dan tujuan kebijakan. Jika tujuan tidak dipahami oleh target kebijakan, maka implementasi akan mengalami hambatan.

Selain itu, menurut Mazmanian & Sabatier, (1983) kejelasan tujuan menjadi syarat utama agar kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten oleh berbagai aktor. Dalam konteks ini, ketidakjelasan sasaran menyebabkan masyarakat tidak memiliki pedoman tindakan yang jelas dalam menghadapi potensi bencana. Implikasinya adalah meningkatnya kerentanan masyarakat karena kurangnya kesiapsiagaan berbasis pemahaman yang komprehensif.

Sumber Daya

Dalam suatu proses implementasi program tentunya membutuhkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya non manusia misalnya finansial dan waktu. Keberhasilan proses implementasi program tersebut sangat tergantung dari sejauh mana ketersediaan sumber daya mampu mengalokasikan standar dan

sasaran kebijakan. Jika sumber daya tidak memadai, maka pada akhirnya berakibat pada tidak berjalannya dengan baik implementasi kebijakan tersebut (Kusmaningtyas, 2009).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil observasi serta wawancara tentang variabel sumber daya, ditemukan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana Bendung Cihamerang masih belum memadai, khususnya pada aspek sumber daya finansial.

Hal ini diperjelas oleh Aparatur Desa A yang menyatakan: "Kalau dari pemerintah desa jelas ini tidak akan bisa dianggarkan, karena ini mencapai biaya yang sangat besar" (Wawancara, 24 April 2026). Selain itu, ia juga menambahkan: "Untuk anggaran, pemerintah kabupaten pun belum bisa mengalokasikan, jadi dilimpahkan kepada pihak investor" (Wawancara, 24 April 2026).

Dari sisi masyarakat, Masyarakat A menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan menutupi kerugian yang dialami (Wawancara, 25 April 2026).

Secara teoritis, sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Model Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan efektivitas sumber daya, dan menekankan bahwa tidak hanya jumlah sumber daya yang penting, tetapi juga distribusi dan pemanfaatannya secara optimal. Ketidakseimbangan ini menyebabkan implementasi menjadi kurang efektif. Implikasinya adalah munculnya kesenjangan perlindungan di masyarakat, yang dapat meningkatkan risiko bencana pada kelompok tertentu.

Karakteristik Agen Pelaksana

Sifat atau karakteristik para agen pelaksana (*stakeholders*) dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan Bendung Cihamerang, yaitu pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak swasta yang memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan instansi terkait, seperti BPBD, Dinas PUTR, serta pihak perusahaan dan investor.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil observasi serta wawancara tentang variabel karakteristik agen pelaksana, ditemukan bahwa agen pelaksana kebijakan telah menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, namun implementasi kebijakan melibatkan banyak aktor sehingga menimbulkan kompleksitas.

Hal ini dijelaskan oleh Aparatur Desa A: "Untuk pembagian tugas kami di pemerintah desa memfasilitasi data warga dan pertanahan, kepala desa sebagai pemangku kebijakan" (Wawancara, 24 April 2026). Sementara itu, dari sisi masyarakat, Masyarakat B menyampaikan: "Kadang respon dari pihak terkait agak lambat, terutama saat kondisi mulai mengkhawatirkan" (Wawancara, 30 Mei 2026).

Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam fleksibilitas birokrasi. Secara teoritis, karakteristik organisasi pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam hal struktur dan pola koordinasi. Implikasinya adalah keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada efektivitas mitigasi bencana.

Disposisi Pelaksana

Disposisi atau kecenderungan para agen pelaksana maksudnya adalah setiap komponen dalam kelima model implementasi kebijakan akan disaring melalui persepsi dari para implementor mengenai nilai tanggungjawab dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan setelah adanya sikap menunjukkan karakteristik sebagai agen pelaksana (Sutmasa, 2021).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil observasi serta wawancara tentang variabel disposisi atau kecenderungan para agen pelaksana, ditemukan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana Bendung Cihamerang sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal.

Hal ini disampaikan oleh Aparatur Desa A: "Sikap dan komitmen, berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan warga masyarakat" (Wawancara, 24 April 2026). Namun, dari sisi masyarakat, Masyarakat A menyatakan: "Responsif setelah viral" (Wawancara, 25 April 2026), dan masyarakat C juga

menambahkan: "Seharusnya penanganan dilakukan lebih cepat sebelum masyarakat merasa khawatir." (Wawancara, 30 Mei 2026).

Secara teoritis, sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi yang kuat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan disposisi yang lemah akan menimbulkan *distrust*. Implikasinya adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat yang dapat menghambat partisipasi dalam mitigasi bencana.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator kinerja kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut (Purnomo, 2018).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil observasi serta wawancara tentang variabel komunikasi antar organisasi, ditemukan bahwa komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah sudah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Aparatur Desa A: "Untuk koordinasi kami tidak pernah berhenti berkoordinasi dengan BPBD, PUTR, BPWS" (Wawancara, 24 April 2026). Namun, dari sisi masyarakat, Masyarakat A menyampaikan bahwa informasi yang diterima masih simpang siur, terutama terkait penanganan teknis di lapangan seperti penyedotan air (Wawancara, 25 April 2026).

Secara teoritis, komunikasi kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Ketidakefektifan komunikasi dapat menyebabkan distorsi informasi dan menurunkan efektivitas kebijakan. Implikasinya sangat besar, terutama dalam konteks bencana, karena informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahan tindakan masyarakat.

Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Politik

Kondisi kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini,

ketersediaan sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Hal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal ini merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik (Akib, 2010).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil observasi serta wawancara tentang variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik, ditemukan bahwa kondisi masyarakat terdampak Bendung Cihamerang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Hal ini diungkapkan oleh Masyarakat A: "Kondisi saat ini sangat merugikan, dan takut ada bencana lanjutan" (Wawancara, 25 April 2026), masyarakat B juga menyatakan: "Aktivitas kami terganggu karena harus selalu waspada." (Wawancara, 30 Mei 2026). Sementara itu, Aparatur Desa A menyatakan: "Masyarakat, semuanya dalam koordinasi bersama pemerintah desa" (Wawancara, 24 April 2026).

Dari sisi sosial, masyarakat cenderung tetap kondusif dan mengikuti arahan pemerintah. Namun, dari sisi politik, terdapat indikasi bahwa respons pemerintah meningkat setelah permasalahan ini menjadi perhatian publik atau viral.

Secara teoritis, kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Implikasinya adalah kebijakan cenderung bersifat reaktif, bukan preventif, sehingga efektivitas mitigasi jangka panjang menjadi terbatas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemerintah dalam mitigasi risiko bencana di Bendung Cihamerang Kabupaten Sumedang belum berjalan secara optimal. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala pada beberapa variabel implementasi. Standar dan sasaran kebijakan belum dipahami secara jelas oleh masyarakat terdampak, sehingga menimbulkan kebingungan terkait arah penanganan dan langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi potensi bencana. Dari aspek

sumber daya, keterbatasan anggaran dan dukungan finansial menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan mitigasi. Sementara itu, karakteristik agen pelaksana menunjukkan bahwa meskipun masing-masing pihak telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya, kompleksitas aktor yang terlibat menyebabkan proses penanganan berjalan kurang efektif dan responsif.

Pada aspek disposisi pelaksana, terdapat komitmen dari pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, namun masyarakat masih menilai bahwa respons penanganan belum dilakukan secara cepat dan proaktif. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi telah berlangsung, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum efektif sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kebijakan yang dijalankan. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan akibat hilangnya lahan pertanian juga turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, sementara respons kebijakan cenderung bersifat reaktif setelah permasalahan menjadi perhatian publik.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan mitigasi bencana yang timbul akibat pembangunan infrastruktur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kejelasan kebijakan, kecukupan sumber daya, efektivitas komunikasi, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperjelas arah dan sasaran kebijakan, memperkuat dukungan sumber daya, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat agar kebijakan mitigasi risiko bencana dapat dilaksanakan secara lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*.

- Ardyan. (2026). *Kurangi Tekanan Air Bendung Cihamerang Sumedang, Penyedotan Terus Dilakukan*. Radar Bandung. <https://www.radarbandung.id/2026/03/06/kurangi-tekanan-air-bendung-cihamerang-sumedang-penyedotan-terus-dilakukan/>
- Aulia, R., Kurniawan, B., & Subhan, M. (2024). IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEPEMIMPINAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI. *Journal of Student Research*.
- Baihaqi, L. H., & Kurniadi, A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN WILAYAH. *JURNAL PAPATUNG*, 6(2).
- Fadhilah, P. Z., & Yuliani, F. (2024). Implementasi Mitigasi Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Kota Bukittinggi. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 199. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.167>
- Haeril, Mas'ud, Irfadat, T., & Hendra. (2021). PENERAPAN KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA (FISIK DAN NONFISIK) DALAM MENGURANGI RISIKO BENCANA DI KABUPATEN BIMA PENERAPAN KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA (FISIK DAN NONFISIK) DALAM MENGURANGI RISIKO BENCANA DI KABUPATEN BIMA. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1.
- Kusmaningtyas, A. (2009). Pentingnya Pemilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*.
- Mankiw, N. G. (2003). *Macroeconomics*. Worth Publishers.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Bloomsbury Academic.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publication.
- Nugraha, D. S., Setiawan, A., Prematuri Agningsih, D., Nurul Aprilianti, D., Sutisna, E., & Yuliani, L. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 5.
- Prakash, S., Soni, G., & Rathore, A. P. S. (2017). Risk analysis and mitigation for perishable food supply chain: a case of dairy industry. *Benchmarking: An International Journal*.

- Purnomo, A. (2018). Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Organisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Sakti, P., Anwar, F., Adriadi, R., & Muhammadiyah Bengkulu, U. (2020). ANALISIS PENERAPAN PROGRAM MITIGASI BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 2(1).
- Subianto, A. (2020). *KEBIJAKAN PUBLIK: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi 2)*. Alfabeta.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. . *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*.
- Wijaya, P. S. (2025a). *Pengeringan Bendung Cihamerang Diawasi Ketat*. Sumedangkab.Go.Id. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pengeringan-bendung-cihamerang-diawasi-ketat>
- Wijaya, P. S. (2025b). *Pengeringan Bendung Cihamerang Terus Dipantau*. Sumedangkab.Go.Id. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pengeringan-bendung-cihamerang-terus-dipantau>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik*. CAPS.